L K P J

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

2025



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat dan hidayah Allah SWT dan atas petunjuk Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun 2025. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama 1 (satu) tahun atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Bupati Tabalong menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Sesuai pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Segala bentuk kemajuan dan keberhasilan yang dicapai selama tahun 2025 merupakan upaya bersama dari seluruh stakeholder pendidikan dan kebudayaan meskipun terdapat hal-hal yang memerlukan upaya peningkatan.

Disadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan yang harus dibenahi dalam rangka pemberian layanan pendidikan dan kebudayaan kepada masyarakat pada tahun 2025. Semoga laporan ini dapat memenuhi prinsip dan substansi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta tetap memenuhi azas tertib, transparansi dan akuntabilitas, sehingga apa yang telah kita laksanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat Kabupaten Tabalong. Oleh karena itu, kami menerima masukan dan saran dari semua pihak yang kiranya bermanfaat bagi kemajuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Tabalong.

Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

Tanjung, 26 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tabalong,

H. HASBI, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat. I
NIP.196802141988041002

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah 1

B. Perencanaan Pembangunan..... 4

C. Prioritas Pembangunan OPD Tahun 2025..... 9

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH

A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 12

B. Capaian Makro atas Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 27

C. Hambatan/Permasalahan dan Upaya Penyelesaian 38

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja..... 41

B. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja 42

C. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan Tahun Sebelumnya 44

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang telah dicapai 45

E. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja 49

BAB IV PENUTUP 63

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1. Dasar Hukum Pembentukan OPD

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor. 39 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi,serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong dipimpim oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan fungsi ;

a. Perumusan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Jumlah Pegawai, Jenjang Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

a. Komposisi Pegawai Dinas Menurut Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Pegawai
1	Golongan IV	7	2	9
2	Golongan III	29	22	51
3	Golongan II	11	3	14
4	Golongan I	0	0	0
Total		47	27	74

b. Komposisi Pegawaian Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Pegawai
1.	SD	0	0	0
2.	SMP	1	0	1
3.	SLTA	8	3	11
4.	Diploma	2	0	2
5.	Sarjana (S1)	27	22	49
6.	Megister (S2	8	3	11
7.	Doktor (S3)	0	0	0
	Total	46	28	74

c. Persentasi Guru di Kabupaten Tabalong yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV

***Persentasi Guru T/RA yang Memenuhi* kualifikasi S1/D.IV**
Tahun 2024/2025

No.	Kecamatan	Jumlah Guru TK/RA/PAUD/BA berijazah kualifikasi	Jumlah Seluruh Guru TK/RA	Persentasi Guru TK/RA/PAUD/BA Yang Memenuhi
1	Kec. Banua Lawas	72	96	75,00
2	Kec. Bintang Ara	27	29	93,10
3	Kec. Haruai	75	107	70,09
4	Kec. Jaro	41	45	91,11
5	Kec. Kelua	113	122	92,62
6	Kec. Muara Harus	24	32	75,00

7	Kec. Muara Uya	67	80	83,75
8	Kec. Murung Pudak	207	318	65,09
9	Kec. Pugaan	21	39	53,85
10	Kec. Tanjung	113	149	75,84
11	Kec. Tanta	46	72	63,89
12	Kec. Upau	17	33	51,52
	Jumlah	**759**	**1.122**	**67,65**

***Persentasi Guru SD/MI yang Memenuhi* kualifikasi S1/D.IV**
Tahun 2024/2025

No.	Kecamatan	Jumlah Guru SD/MI berijazah kualifikasi S1/D-IV	Jumlah Guru Seluruh Guru SD/MI	Persentasi Guru SD/MI Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D.IV
1	Kec. Banua Lawas	225	234	96,15
2	Kec. Bintang Ara	125	137	91,24
3	Kec. Haruai	236	249	94,78
4	Kec. Jaro	172	176	97,73
5	Kec. Kelua	299	282	106,03
6	Kec. Muara Harus	88	90	97,78
7	Kec. Muara Uya	233	237	98,31
8	Kec. Murung Pudak	408	425	96,00
9	Kec. Pugaan	109	103	105,83
10	Kec. Tanjung	392	430	91,16
11	Kec. Tanta	245	267	91,76
12	Kec. Upau	73	75	97,33
	Jumlah	**2.605**	**2.705**	**96,30**

***Persentasi Guru SMP/MTs yang Memenuhi* kualifikasi S1/D.IV**
Tahun 2024/2025

No.	Kecamatan	Jumlah Guru SMP/MTs berijazah kualifikasi S1/D-IV	Jumlah Seluruh Guru SMP/MTs	Persentasi Guru SMP/MTs Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D.IV
1	Kec. Banua Lawas	91	92	98,91
2	Kec. Bintang Ara	72	73	98,63
3	Kec. Haruai	149	160	93,13
4	Kec. Jaro	82	86	95,35
5	Kec. Kelua	131	130	100,77
6	Kec. Muara Harus	56	60	93,33
7	Kec. Muara Uya	107	108	99,07
8	Kec. Murung Pudak	172	173	99,42
9	Kec. Pugaan	45	45	100,00
10	Kec. Tanjung	209	275	76,00
11	Kec. Tanta	89	93	95,70
12	Kec. Upau	53	58	91,38
	Jumlah	**1.256**	**1.353**	**92,83**

B. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1. Visi dan Misi OPD

   Visi daerah merupakan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode perencanaan jangka menengah daerah, Visi RPJMD kabupaten Tabalong 2025 – 2029 adalah: **" *TABALONG TERDEPAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN*"**

2. Startegi dan Arah Kebijakan

   Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan RPJMD Kabupaten Tabalong. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 – 2029 dirumuskan berdasarkan Visi, Misi, Tujuan

dan Sasaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Tabalong dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai tahun 2025.

Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan tahun 2025 – 2029 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tabalong. Berdasarkan kajian pada tujuan dan sasaran di atas terlihat ada beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pelayanan pendidikan secara prima. Komponen- komponen tersebut antara lain : pendidik dan tenaga kependidikan, sistem pembelajaran, sarana dan prasarana, prestasi siswa, serta tata kelola yang akuntabel.

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2025 – 2029

Visi : " TABALONG TERDEPAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN "			
Misi I : "Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera "			
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator**
➢ Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih ➢ Meningkatnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama	1. Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah serta terwujudnya berkebudayaan maju	1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
			2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD
			3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD
			4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP
			5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP
			6. Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/ MI/ Paket A
			7. Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTs/ Paket B
			8. Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI
			9. Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs
			10. Persentase PTK PAUD Formal yang Memiliki

			Kualifikasi S-1/D-IV
			11. Persentase PTK SD Formal yang Memiliki Kualifikasi S-1/D-IV
			12. Persentase PTK SMP Formal yang Memiliki Kualifikasi S-1/D-IV
			13. Persentase Penduduk yang Berusia > 15 Tahun Melek (Tidak Buta Aksara)
Misi II : " Mengembangkan Kehidupan yang Religius "			
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator**
		2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	14. Persentase Kebudayaan Daerah yang dilestarikan
			15. Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan

3. Program Strategis Tahun 2024

Program Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabaalong Tahun 2024 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pengembangan Kebudayaan
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN OPD TAHUN 2025

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang merupakan kebijakan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong akan memberikan prioritas utama pada program dan kegiatan yang menunjang peningkatan pendidikan serta pencapaian tujuan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan dan Pembinaan PAUD;
2. Meningkatkan pengembangan dan pelestarian seni budaya daerah;
3. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan pendidikan sekolah dasar;
4. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama;
5. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan pendidikan kesetaraan;
7. Meningkatkan layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu;

Untuk dapat melaksanakan program prioritas tersebut diatas ditetapkan kebijakan pengelolaan pendidikan di Kabupaten Tabalong sebagai berikut :

1. Melaksanakan kurikulum dan penilaian PAUD sesuai dengan kebijakan Nasional;
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan sarana prasarana PAUD;
3. Meningkatkan kualitas dan karakter peserta didik PAUD;
4. Melaksanakan kurikulum dan penilaian Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sesuai dengan kebijakan Nasional;

5. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
6. Meningkatkan kualitas dan karakter peserta didik Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
7. Melaksanakan kurikulum dan penilaian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sesuai dengan kebijakan Nasional;
8. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
9. Meningkatkan kualitas dan karakter peserta didik Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
10. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas dan kompetensi PTK PAUD;
11. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas dan kompetensi PTK Pendidikan Dasar (Dikdas);
12. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas dan kompetensi Tenaga Kebudayaan;
13. Peningkatan infrastruktur situs cagar budaya;
14. Peningkatan pelestarian sejarah dan tradisi.;
15. Peningkatan pelestarian kesenian daerah.;
16. Peningkatan apresiasi terhadap kebudaya lokal; dan
17. Penguatan kelembagaan sekolah penyelenggara paket A, B dan C.

Tabel 1.2 : Program Prioritas Pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong :

NO.	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
1	2	3
1.	**Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
2.	**Program Wajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.**	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama
3.	**Program Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan**	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
4.	**Bidang Kebudayaan**	Terlestarikannya Cagar Budaya

BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 2.1. Capaian Program Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No	Uusan Pemerintah	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Rincian Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Sisa Anggaran
					Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja			
					Rp	%	Rp	%			
1	Urusan Wajib Pemerintah Bidang Pendidikan	Meningkatnya Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Yang Bermutu	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 13.420.000,00	100	Rp. 2.824.200,00	21,04	Untuk kegiatan yang di anggarkan pada sub kegiatan ini tidak bisa direalisasi perjalanan dinas dalam kota (Musrenbang)		Rp 10.595.800,00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Rp. 49.306.420,00	100	Rp. 31.323.450,00	63,53	Untuk kegiatan yang di anggarkan pada sub kegiatan ini sudah terealisasi		Rp. 17.982.970,00

				SKPD					dengan baik tetapi dengan menggunakan anggaran kegiatan pada sub kegiatan lain karena berkaitan dengan realisasi perjalanan dinas		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 233.095.240,00	100	Rp. 217.263.731,00	93,21	-	-	Rp. 15.831.509,00
		Indikator Nilai Hasil Evaluasi AKIP pada Sekretariat	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 411.581.422.179,00	100	Rp. 343.815.166.213,00	83,54	-	-	Rp. 67.766.255.966,00
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 71.846.940,00	100	Rp. 52.385.500,00	72,91			Rp. 19.461.440,00
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	Rp 272.059.000,00	100	Rp 131.015.800,00	48,16		-	Rp. 141.043.200,00

				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 114.356.000,00	100	Rp 105.480.000,00	92,24	-	-	Rp 8.876.000,00
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 789.761.758,00	100	Rp 713.999.990,00	90,41	-	-	Rp 75.761.768,00
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 31.119.673,00	100	Rp 19.731.300,00	63,40			Rp 11.388.373,00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 593.833.000,00	100	Rp. 590.890.894,00	99,50			Rp 2.942.106,00
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 1.202.632.704,00	100	Rp. 1.164.296.399,00	96.81			Rp. 38.336.305,00
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 236.240.000,00	100	Rp. 182.460.989,00	77,24			Rp. 53.779.011,00
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.945.260.910,00	100	Rp. 1.494.608.606,00	76,83			Rp. 450.652.304,00

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 73.370.000,00	100	Rp. 73.056.900,00	99,57			Rp. 313.100,00
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 105.020.000,00	100	Rp. 78.174.800,00	74,44			Rp. 26.845.200,00
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 48.760.000,00	100	Rp. 36.417.000,00	74,69			Rp. 12.343.000,00
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 1.895.611.944,00	100	Rp. 1.716.910.000,00	90,57			Rp. 178.701.944,00

No	Uusan Pemerintah	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Rincian Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Sisa Anggaran
					Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja			
					Rp	%	Rp	%			
2	Urusan Wajib Pemerintah Bidang Pendidikan	Menjamin Peningkatan pengelolaan lembaga Pendidikan PAUD	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp. 2.703.780.000,00	100	Rp. 2.653.855.838,00	98,15	-	-	Rp 49.924.162,00
				Pengadaan Mebel PAUD	Rp. 269.690.980,00	100	Rp 264.019.050,00	97,90	-		Rp 5.671.930,00
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Rp. 10.114.680.000,00	100	Rp. 9.616.910.000,00	95,08			Rp 497.770.000,00
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Rp. 259.399.008,00	100	Rp 232.621.300,00	89,68	-		Rp 26.777.708,00
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rp. 245.589.969,00	100	Rp. 225.778.000,00	91,93	-	-	Rp 19.811.969,00
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp. 5.758.992.000,00	100	Rp. 4.971.475.878,00	86,33	-		Rp 787.516.122,00
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp. 4.907.138.765,00	100	Rp. 4.796.729.000,00	97,75			Rp 110.409.765,00
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Rp. 4.255.935.110,00	100	Rp. 4.227.870.414,00	99,34			Rp. 28.064.696,00

				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp. 1.865.000.293,00	100	Rp. 1.838.944.000,00	98.60			Rp. 26.056.293,00
			Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Rp. 241.500.000,00	100	Rp. 118.801.000,00	49,19			Rp 122.699.000,00
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah NON Formal/Kesetaraan	Rp. 2.299.320.000,00	100	Rp. 1.908.507.677,00	83,00	-	-	Rp 390.812.323,00
				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp. 995.078.537,00	100	Rp. 903.304.300,00	90,78			Rp. 91.774.237,00

No	Uusan Pemerintah	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Rincian Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Sisa Anggaran
					Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja			
					Rp	%	Rp	%			
3	Urusan Wajib Pemerintah Bidang Pendidikan	Menjamin Peningkatan pengelolaan lembaga Pendidikan Sekolah Dasar	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp. 402.847.800,00	100	Rp. 390.297.500,00	96,88			Rp. 12.550.300,00
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp. 1.018.004.000,00	100	Rp. 995.909.490,00	97,83	-	-	Rp. 22.094.510,00
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp. 9.844.770.832,00	100	Rp. 9.787.768.415,00	99,42	-	-	Rp. 57.002.417,00
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rp. 948.554.000,00	100	Rp. 946.194.450,00	99,75	-	-	Rp. 2.359.550,00

				Pengadaan Mebel Sekolah	Rp. 1.360.455.600,00	100	Rp. 1.327.200.289,00	97,56	-	-	Rp. 33.255.311,00
				Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp. 1.089.297.679,00	100	Rp. 832.501.034,00	76,43	-	-	Rp. 256.796.645,00
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp. 250.800.000,00	100	Rp. 123.500.000,00	49,24	-	-	Rp. 127.300.000,00
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp. 566.514.358,00	100	Rp. 425.251.700,00	75,06	-	-	Rp. 141.262.658,00
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp. 1.651.764.067,00	100	Rp. 1.170.265.769,00	70,85	-	-	Rp. 481.498.298,00
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp. 25.282.201.000,00	100	Rp. 24.117.132.593,00	95,39	-	-	Rp. 1.165.068.407,00
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp. 202.866.468,00	100	Rp. 77.012.000,00	37,96	-	-	Rp. 125.854.468,00
				Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp. 112.941.320,00	100	Rp. 54.955.000,00	48,66	-	-	Rp. 57.986.320,00
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp. 58.705.400,00	100	Rp. 55.570.382,00	94,66	-	-	Rp. 3.135.018,00
				Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp. 6.960.000,00	100	Rp. 6.960.000,00	100	-	-	Rp. 0

				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp. 111.843.400,00	100	Rp. 42.835.000,00	38,30	-	-	Rp. 69.008.400,00
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 127.800.000,00	100	Rp. 127.800.000,00	100	-	-	Rp. 0
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi	Rp. 51.946.400,00	100	Rp. 25.320.000,00	48,74	-	-	Rp. 26.626.400,00
				Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Rp. 192.500.000,00	100	Rp. 181.500.429,00	94,29	-	-	Rp. 10.999.571,00
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp. 577.350.000,00	100	Rp. 574.197.728,00	99,45	-	-	Rp. 3.152.272,00
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp. 6.937.357.800,00	100	Rp. 5.558.151.753,00	80,12	-	-	Rp. 1.379.206.047,00
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp. 2.831.246.363,00	100	Rp. 2.784.658.619,00	98,35	-	-	Rp. 46.587.744,00
				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Rp. 297.348.860,00	100	Rp. 276.166.870,00	92,88	-	-	Rp. 21.181.990,00
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp. 6.641.008.800,00	100	Rp. 6.564.437.050,00	98,85	-	-	Rp. 76.571.750,00
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rp. 7.144.500.000,00	100	Rp. 7.104.250.000,00	99,44	-	-	Rp. 40.250.000,00
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp. 5.116.555.000,00	100	Rp. 4.568.668.809,00	89,29	-	-	Rp. 547.886.191,00

o	Uusan Pemerintah	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Rincian Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Sisa Anggaran
					Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja			
					Rp	%	Rp	%			
4	Urusan Wajib Pemerintah Bidang Pendidikan	Menjamin Peningkatan pengelolaan lembaga Pendidikan Sekolah Menegah Pertama	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp. 1.153.952.000,00	100	Rp. 1.145.495.000,00	99,27	-	-	Rp. 8.457.000,00
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp. 1.018.000.000,00	100	Rp. 986.068.000,00	96,86	-	-	Rp. 31.932.000,00
				Pembangunan Laboratorium	Rp. 2.259.145.000,00	100	Rp. 2.205.318.577,65	97,62	-	-	Rp. 53.826.422,35
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp. 5.355.543.526,00	100	Rp. 5.278.712.001,28	98,57	-	-	Rp. 76.831.524,72
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp. 3.254.210.858,00	100	Rp. 3.050.774.000,00	93,75	-	-	Rp. 203.436.858,00
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp. 5.271.798.080,00	100	Rp. 5.054.951.550,00	95,89	-	-	Rp. 216.846.530,00
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rp. 8.449.060.285,00	100	Rp. 7.854.649.026,00	92,96	-	-	Rp. 594.411.259,00

				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp. 1.932.070.587,00	100	Rp. 1.429.944.683,00	74,01	-	-	Rp. 502.125.904,00
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp. 705.800.000,00	100	Rp. 212.000.000,00	30,04	-	-	Rp. 493.800.000,00
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp. 650.244.364,00	100	Rp. 428.645.160,00	65,92	-	-	Rp. 221.599.204,00
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp. 1.440.788.014,00	100	Rp. 1.188.866.399,00	82,52	-	-	Rp. 251.921.615,00
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rp. 9.111.650.000,00	100	Rp. 8.420.964.280,00	92,42	-	-	Rp. 690.685.720,00
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp. 500.000,00	100	Rp. -	0,00	-	-	Rp. 500.000,00
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 241.535.569,00	100	Rp. 129.549.750,00	53,64	-	-	Rp. 111.985.819,00

				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp. 199.779.178,00	100	Rp. 81.470.500,00	40,78	-	-	Rp. 118.308.678,00
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp. 6.390.557.160,00	100	Rp. 5.477.310.873,04	85,71	-	-	Rp. 913.246.286,96
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp. 414.193.050,00	100	Rp. 309.050.903,00	74,62	-	-	Rp. 105.142.147,00
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp. 5.237.500.000,00	100	Rp. 4.731.785.318,00	90,34	-	-	Rp. 505.714.682,00

No	Uusan Pemerintah	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Rincian Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Sisa Anggaran
					Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja			
					Rp	%	Rp	%			
5	Urusan Wajib Pemerintah Bidang Pendidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Perhitungan dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Rp. 2.208.174.553,00	100	Rp. 1.489.223.516,00	67,44	-	-	Rp. 718.951.037,00

				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Rp. 5.536.178.650,00	100	Rp. 2.905.242.000,00	52,48	-	-	Rp. 2.630.936.650,00

No	Uusan Pemerintah	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Rincian Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan	Sisa Anggaran
					Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja			
					Rp	%	Rp	%			
6	Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan	Meningkatnya pengelolaan cagar budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp. 2.930.378.684,00	100	Rp. 2.625.608.136,00	89,60	-	-	Rp. 304.770.548,00
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Rp. 1.562.932.386,00	100	Rp. 1.309.553.355,00	83,79	-	-	Rp. 253.379.031,00
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Rp. 3.151.000.000,00	100	Rp. 2.810.249.000,00	89,19	-	-	Rp. 340.751.000,00
		Meningkatnya pengelolaan seni budaya daerah	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Perlindungan Cagar Budaya	Rp. 609.583.402,00	100	Rp. 342.538.566,00	56,19	-	-	Rp. 267.044.836,00

JUMLAH	**Rp. 595.083.934.923,00**	**100**	**Rp. 509.771.297.702,97**	**85,66**	**-**	**-**	**Rp. 85.312.637.220,03**

B. CAPAIAN MAKRO ATAS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025.

Capaian makro atas pelaksanaan program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 dapat dilihat pada Laporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Tabel 2.2
Capaian Makro Atas Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Persentasi Capaian Tahun 2025
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	100	96,17	96,17
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	100	101,29	101,29
3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	99,41	97,32	97,90
4.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	100	95,01	95,01
5.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	82,89	83,12	100,28
6.	Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/ MI/ Paket A	%	100	99,29	99,29
7.	Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTs/ Paket B	%	100	93,07	93,07
8.	Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0	0,01	0,01
9.	Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0	0,13	0,13
10.	Persentase PTK PAUD Formal yang Memiliki Kualifikasi S-1/D-IV	%	69,05	67,65	97,97
11.	Persentase PTK SD Formal yang Memiliki Kualifikasi S-1/D-IV	%	95	96,30	101,37
12.	Persentase PTK SMP Formal yang Memiliki Kualifikasi S-1/D-IV	%	95	92,83	97,72

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Persentasi Capaian Tahun 2025
13.	Persentase Penduduk yang Berusia > 15 Tahun Melek (Tidak Buta Aksara)	%	98,01	97,91	99,90
14.	Persentase Kebudayaan Daerah yang dilestarikan	%	83	100	120,48
15.	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	%	83		
16.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	100

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Formal

Angka ini diperoleh melalui pengukuran Jumlah Peserta Didik Yang Sekolah di PAUD dibagi Jumlah Penduduk Kelompok Usia 5 – 6 Tahun dikali 100%. Realisasi APK PAUD tahun 2025 sebesar 96,17% (Jumlah siswa PAUD usia 5 – 6 tahun 8.975 siswa dibagi jumlah penduduk usia 5-6 tahun 9.332 Orang dari target 100,00 dengan capaian 96,17%..

Tabel : 2.3
APK PAUD Tahun 2021 s.d. Tahun 2025

NO	TAHUN	APK PAUD
1	2021	114,37 %
2	2022	99,36 %
3	2023	70,46%
4	2024	119,28
5	2025	96,17

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

Angka ini diperoleh melalui pengukuran Jumlah Peserta Didik Yang Sekolah di SD/MI/Paket A dibagi Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7 – 12 Tahun dikali 100%. Realisasi indikator tahun 2025 sebesar 101,29% (Jumlah Peserta Didik Yang Sekolah di SD/MI/Paket A 29.240 siswa dibagi Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7 – 12 Tahun 28.867 orang).

Pencapaian APK SD/MI/Paket A didukung melalui program wajib belajar

pendidikan dasar sembilan tahun dengan kegiatan penambahan ruang kelas sekolah. Berikut tabel realisasi APK SD/MI/Paket A dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tabel : 2.4
APK SD/MI/Paket A
Dari Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2025

No	Tahun	APK SD/MI/Paket A
1	2021	107,44
2	2022	110,54
3	2023	110,60
4	2024	101,04
5	2025	101,29

3. *Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A*

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah peserta didik usia 7 -12 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7 -12 tahun dikali 100%. Realisasi indikator tahun 2025 sebesar 97,57 % (jumlah peserta didik usia 7 -12 tahun sebanyak 28.094 dibagi jumlah penduduk usia 7 -12 tahun 28.867) dari 99,41% yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 97,90% Indikator ini didukung dengan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan kegiatan Penambahan ruang kelas. Penyediaan dana untuk pengembangan sekolah SD/MI dan SMP/MTs. Berikut tabel realisasi APM SD/MI/Paket A dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025

Tabel : 2.5
APM SD/MI/Paket A
Dari Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2025

No	Tahun	APM SD/MI/Paket A
1	2021	99,93
2	2022	105,75
3	2023	79,91
4	2024	97,57
5	2025	97,32

4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah Peserta Didik Yang Sekolah di SMP/MTs/Paket B 14.057 dibagi jumlah Penduduk Kelompok Usia 13– 15 Tahun 14.796 dikali 100 %. Realisasi indikator tahun 2025 sebesar 95,01 % dari 100 % yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 95,01 %. Berikut tabel realisasi Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tabel : 2.6
Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
Dari Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2025

No	Tahun	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
1	2021	113,10%
2	2022	101,50%
3	2023	101,58
4	2024	91,22
5	2025	95,01

5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah peserta didik usia 13- 15 tahun dibagi jumlah penduduk usia 13 -15 tahun dikali 100%. Realisasi indikator tahun 2025 sebesar 83,12 % (jumlah peserta didik usia 13- 15 tahun 12.229 dibagi jumlah penduduk usia 13 -15 tahun 14.796) dari 82,89% yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 100,28%. Berikut tabel realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tabel : 2.7
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025

No	Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
1	2021	98,58%
2	2022	104,42 %
3	2023	86,77%
4	2024	91,22%
5	2025	83,12%

6. ***Persentase angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A***

Angka ini diperoleh melalui pengukuran Jumlah Lulusan Pada Jenjang SD/MI 4.916 dibagi Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi Pada Jenjang SD/MI Pada Tahun Ajaran Sebelumnya 4.951 dikali 100%. Realiasasi indikator pada tahun 2025 sebesar 99,29 %. Dengan target capaian sebesar 100%. Berikut tabel realisasi angka kelulusan SD dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tabel : 2.8
Persentase angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A
Dari Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2025

No	Tahun	Persentase angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A
1	2021	100%
2	2022	100%
3	2023	100%
4	2024	99,64%
5	2025	99,29%

7. ***Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B***

Angka ini diperoleh melalui pengukuran Jumlah Lulusan Pada Jenjang SMP/MTs (4.083) dibagi Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi Pada Jenjang SMP/MTs Pada Tahun Ajaran Sebelumnya (4.387) dikali 100%. Realisasi indikator tahun 2025 sebesar 93,07% dari 100% yang ditargetkan.

Berikut tabel angka kelulusan (AL) SMP/MTs/paket B dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tabel : 2.9
Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B
Dari Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2024

No	Tahun	Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B
1	2021	100%
2	2022	100%
3	2023	100%
4	2024	96,55%
5	2025	93,07%

8 ***Persentase angka putus sekolah satuan sekolah dasar***

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah penduduk usia 7 -12 tahun yang tidak bersekolah lagi 3 orang dibagi jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun yang pernah/sedang bersekolah 29.160 siswa dikali 100%. Realisasi indikator tahun 2025 sebesar 0,01% dari 0% yang ditargetkan. Berikut tabel persentase angka putus sekolah satuan sekolah dasar per kecamatan tahun 2025.

Tabel : 2.10
Persentase angka putus sekolah satuan sekolah dasar perkecamatan
Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI	Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	Angka Putus Sekolah (APS) SD
1	Banua Lawas	1	2.123	0,05
2	Bintang Ara	-	1.021	-
3	Haruai	-	2.551	-
4	Jaro	-	1.685	-
5	Kelua	-	2.922	-
6	Muara Harus	-	756	-
7	Muara Uya	-	2.502	-

8	Murung Pudak	-	6.730	-
9	Pugaan	1	713	0,14
10	Tanjung	1	4.400	0,02
11	Tanta	-	2.971	-
12	Upau	-	827	-
	J U M L A H	**3**	**29.160**	**0,01**

9. Persentase angka putus sekolah satuan Sekolah Menengah Pertama

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah penduduk usia 13 -15 tahun yang tidak bersekolah lagi dibagi jumlah penduduk usia 13 -15 tahun yang pernah/sedang bersekolah dikali 100%. Realisasi indikator tahun 2025 sebanyak 16 orang atau 0,13% dari 0 % yang ditargetkan. Berikut tabel persentase angka putus sekolah satuan sekolah menengah pertama per kecamatan tahun 2025.

Tabel : 2.11
Persentase Angka Putus Sekolah Satuan Sekolah Menengah Pertama Per Kecamatan Tahun 2025

No.	Kecamatan	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs	Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
1	Banua Lawas	1	664	0,15
2	Bintang Ara	-	327	-
3	Haruai	1	1.387	0,07
4	Jaro	8	1.032	0,78
5	Kelua	2	1.175	0,17
6	Muara Harus	-	474	-
7	Muara Uya	2	1.024	0,20
8	Murung Pudak	1	2.217	0,05
9	Pugaan	-	271	-
10	Tanjung	1	2.937	0,03
11	Tanta	-	794	-
12	Upau	-	435	-
	J U M L A H	**16**	**12.737**	**0,13**

10. Persentase guru PAUD yang memiliki kualifikasi S1/D-IV

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah guru PAUD yang memiliki kualifikasi S1/D-IV sebanyak 759 orang dibagi jumlah guru yang ada sebanyak 1.122 orang dikali 100%. Realisasi indikator kinerja sebesar 67,65% yang ditargetkan dengan capaian kinerja sebesar 69,05%. Salah satu penyebabnya belum tercapainya indikator ini adalah adanya guru yang sudah/akan memasuki usia pensiun sehingga mereka tidak bersedia lagi untuk melanjutkan ke S1. Berikut pencapaian persentase guru PAUD yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tabel : 2.12
Persentase Guru PAUD Yang Memiliki Kualifikasi S1/D-IV
Dari Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2025

No	Tahun	Persentase Guru PAUD Yang Memiliki Kualifikasi S1/D-IV
1	2021	61,95 %
2	2022	76,32 %
3	2023	72,83 %
4	2024	97,64%
5	2025	67,65%

11. Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV pada satuan Sekolah Dasar

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV dibagi jumlah tenaga pendidik yang ada dikali 100%. Realisasi indikator tahun 2025 sebesar 96,30% dari 95,00% yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 103,37%. Angka diperoleh jumlah guru yang berkualifikasi S1/D-IV sebanyak 2.605 dibagi jumlah guru seluruhnya sebanyak 2.705 orang dikali 100%. Berikut tabel realisasi Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV pada satuan sekolah dasar dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tabel : 2.13
Persentase Tenaga Pendidik Berkualifikasi S1/D-IV Pada Satuan Sekolah Dasar
Dari Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2025

No	Tahun	Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV pada satuan sekolah dasar
1	2021	94,87 %
2	2022	92,70 %
3	2023	94,53%
4	2024	93,03%
5	2025	96,30%

12. Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV pada satuan Sekolah Menengah Pertama

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV (1.256 orang) dibagi jumlah tenaga pendidik seluruhnya (1.353 orang) dikali 100%. Realisasi indikator sebesar 92,53% dari 95% yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 97,72%. Berikut tabel realisasi persentase tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV pada satuan sekolah menengah pertama dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tabel : 2.14
Persentase Tenaga Pendidik Berkualifikasi S1/D-IV Pada Satuan Sekolah Menengah Pertama
Dari Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2025

No	Tahun	Persentase Tenaga Pendidik Berkualifikasi S1/D-IV Pada Satuan Sekolah Menengah Pertama
1	2021	97,76 %
2	2022	95,03 %
3	2023	98,38 %
4	2024	94,63 %
5	2025	92,53 %

13. Persentase penduduk yang berusia ≥ 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Penuntasan buta aksara merupakan bagian dari fokus pembangunan untuk peningkatan human capital. Hal ini mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara, maupun sebagai daya ungkit pendidikan terhadap tujuan pembangunan yang lain seperti pembangunan dan pemerataan ekonomi dan sosial. Terlebih lagi dalam RPJMD Kabupaten Tabalong 2025-2029, melek huruf merupakan salah satu indikator sasaran dari RPJMD Kabupaten Tabalong. Adapun realisasi dari indikator Persentase penduduk yang berusia ≥ 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) diperoleh dari Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Dapat Baca dibagi Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas dikali 100%. Realisasi indikator tahun 2025 sebesar 97,91% (Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Dapat Baca 184.394 orang dibagi Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas 188.333) dikali 100% dari 97,91% yang ditargetkan dengan realisasi capaian sebesar 98,01%.

Tabel : 2.15
Persentase penduduk yang berusia ≥ 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
Dari Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2025

NO	TAHUN	Persentase penduduk yang berusia ≥ 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
1	2021	99,52%
2	2022	99,53%
3	2023	99,55%
4	2024	97,91%
5	2025	97,91%

14. Persentase Kebudayaan Daerah yang dilestarikan.

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah kebudayaan yang dilestarikan dibagi jumlah kebudayaan yang ada, Realisasi tahun 2025 sebanyak 11 buah dari 83% yang ditargetkan atau sebesar 110%.

15. Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan

Angka ini diperoleh melalui pengukuran jumlah Partisipasi Masyarakat

Terhadap Pengembangan Kebudayaan dibagi jumlah penduduk yang ada, Realisasi tahun 2025 sebanyak 11 buah dari 10 buah yang ditargetkan atau sebesar 100%.

16. *Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah*

Nilai hasil evaluasi AKIP SKPD menjadi indikator yang cukup menentukan terhadap kualitas kinerja SKPD, karena semakin baik nilai evaluasi AKIP SKPD menunjukan bahwa pola manajemen dalam suatu organisasi telah berjalan dengan baik dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dimana seluruh unsur tersebut menentukan tingkat keberhasilan SKPD dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi AKIP SKPD setiap tahunnya dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tabalong. Nilai evaluasi AKIP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong yang ditetapkan pada Tahun 2024 kategori BB.

Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya nilai evaluasi AKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong akan terus meningkat sehingga dapat menunjang nilai evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk memperoleh nilai BB.

C. HAMBATAN/PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN (SARAN DAN TINDAK LANJUT)

1. Ada beberapa kegiatan yang menggunakan jasa penyedia lewat penawaran lelang di atas 15 % sampai 20 % dari pagu anggaran sehingga tidak terserap 100 %.
2. Kegiatan yang anggrannya tercantum di DPA tapi realisasi BOP PAUD tidak tercatat pada SKPD karena langsung pada Lembaga masing-masing karena sifatnya hibah.
3. Adanya Kegiatan lomba-lomba yang tidak dapat terealisasi karena dilakukan secara daring mengikuti juknis dari pusat

Disamping permasalahan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak tercapainya target beberapa indikator keinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut ;

a. Permasalahan pada Pelayanan Pendidikan Usia Dini

1. Masih rendahnya partisipasi dan kesadaran orang tua yang memiliki anak-anak pada usia 4-6 tahun untuk memasukkan anaknya pada pelayanan pendidikan di jenjang PAUD;
2. Berdasarkan Standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal, di jenjang pendidikan TK masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1/D.IV;
3. Pemerataan guru, penempatan guru bersertifikasi dan berkualifikasi kurang merata, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi didaerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi

b. Permasalahan pada Pelayanan Pendidikan Dasar

1. Kekurangan ruang kelas Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) secara tidak langsung berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar;
2. Berdasarkan Standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal, di jenjang pendidikan SD dan SMP masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1;
3. Pemerataan guru, penempatan guru bersertifikasi dan berkualifikasi kurang merata, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi didaerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi;

4. Kurangnya koordinasi terkait pendataan siswa SD/MI maupun SMP/MTs yang melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren atau sekolah yang berbasis keagamaan.

c. Permasalahan pada Pelayanan Pendidikan Kesetaraan

1. Rendahnya Motivasi belajar karena latar belakang sosial dan ekonomi sehingga lebih memilih untuk bekerja;
2. Terbatasnya jumlah dan mutu tenaga profesional pada institusi pendidikan kesetaraan di daerah dalam mengelola, mengembangkan dan melembagakan pendidikan kesetaraan;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan baik yang menunjang penyelenggaraan maupun proses pembelajaran;
4. Rendahnya peran serta masyarakat dalam memprakarsai penyelenggaraan dan pelembagaan pendidikan kesetaraan.

Untuk menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi, perlu adanya solusi agar pencapaian SPM bidang pendidikan dasar baik itu yang menyangkut pelayanan dasar oleh Kabupaten maupun pelayanan dasar oleh satuan pendidikan lebih ditingkatkan lagi ke depannya. Adapun langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Optimalisasi penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN untuk pemenuhan ruang kelas agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik;
2. Memberikan kesempatan pendidikan penyetaraan S-1/D.IV serta bantuan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru baik yang dibiayai pemerintah maupun swadaya murni para guru;
3. Melakukan pemerataan guru dimulai dari di tingkat kecamatan dan menekan adanya perpindahan dari sekolah yang kurang guru ke sekolah yang sudah memenuhi kecukupan guru;
4. Melakukan optimalisasi kegiatan PKG dan PKB;
5. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Tabalong terkait pendataan dan keterlibatan lembaga di bawah kewenangan Kementerian Agama yaitu MI dan MTs maupun Pondok Pesantren atau sekolah yang berbasis keagamaan;
6. Meningkatkan komitmen bersama dari pengambil kebijakan di Kabupaten Tabalong yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Tabalong, Kementerian Agama, serta Yayasan tentang pengaturan tenaga pendidik, penerimaan guru dan pemerataan guru di lembaganya;

7. Mensosialisasikan kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan anak usia dini;
8. Mengidentifikasi data ATS (Angka Tidak Sekolah);
9. Lokakarya warga belajar untuk mendapatkan layanan PKBM;
10. Meningkatkan jumlah dan mutu tenaga profesional pada institusi pendidikan kesetaraan di daerah dalam mengelola, mengembangkan dan melembagakan pendidikan kesetaraan;
11. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan baik yang menunjang penyelenggaraan maupun proses pembelajaran dalam rangka memperluas kesempatan, peningkatan mutu dan relevansi hasil program pendidikan kesetaraan dengan kebutuhaan pembangunan.

Dengan adanya tabulasi permasalahan dan rencana solusi yang akan diambil diharapkan dapat mencapai target pencapaian SPM pada tahun berikutnya.

BAB. III
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

A. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

Tabel. 3.1.

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Tabalong Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Aksesbilitas Pendidikan (PAUD dan Dikmas)	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan berkualitas	100
		Meningkatnya kesempatan peserta didik miskin dan peserta didik Disabilitas untuk mendapatkan layanan pendidikan	100
		Meningkatnya Kualitas kelembagaan Satuan Pendidikan	100
2	Meningkatkan Kualitas Pendidikan (PAUD dan Dikmas)	Meningkatnya Kualitas kelembagaan Satuan Pendidikan	100
3	Meningkatkan Aksesbilitas Pendidikan (SD)	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan berkualitas	100
		Meningkatnya kesempatan peserta didik miskin dan peserta didik Disabilitas untuk mendapatkan layanan pendidikan	100
		Meningkatnya Kualitas kelembagaan Satuan Pendidikan	100
4	Meningkatkan Kualitas Pendidikan (SD)	Meningkatnya Kualitas kelembagaan Satuan Pendidikan	100
		Meningkatnya Kualitas Siswa	100
		Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Daerah	100
5	Meningkatkan Aksesbilitas Pendidikan (SMP)	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan berkualitas	100
		Meningkatnya kesempatan peserta didik miskin dan peserta didik Disabilitas untuk mendapatkan layanan pendidikan	100

		Meningkatnya Kualitas kelembagaan Satuan Pendidikan	100
6	Meningkatkan Kualitas Pendidikan (SMP)	Meningkatnya Kualitas kelembagaan Satuan Pendidikan	100
		Meningkatnya Kualitas Siswa	100
		Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Daerah	100
7	Meningkatkan Kualitas Pendidikan (PTK)	Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100
8	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Daerah	Meningkatnya upaya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah	100
9	Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah	Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	BB

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA.

Tabel. 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Aksesbilitas Pendidikan (PAUD dan Dikmas)	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan berkualitas	100	98,43	98,43
		Meningkatnya kesempatan peserta didik miskin dan peserta didik Disabilitas untuk mendapatkan layanan pendidikan	100	91,87	91,87
		Meningkatnya Kualitas kelembagaan Satuan Pendidikan	100	98,43	98,43
2	Meningkatkan Kualitas Pendidikan (PAUD dan Dikmas)	Meningkatnya Kualitas kelembagaan Satuan Pendidikan	100	82,88	82,88
3	Meningkatkan Aksesbilitas	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan	100	94,66	94,66

	Pendidikan (SD)	berkualitas			
		Meningkatnya kesempatan peserta didik miskin dan peserta didik Disabilitas untuk mendapatkan layanan pendidikan	100	95,33	95,33
4	Meningkatkan Kualitas Pendidikan (SD)	Meningkatnya Kualitas kelembagaan Satuan Pendidikan	100	71,06	71,06
		Meningkatnya Kualitas Siswa	100	96,43	96,43
		Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Daerah	100	94,29	94,29
5	Meningkatkan Aksesbilitas Pendidikan (SMP)	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan berkualitas	100	93,59	93,59
		Meningkatnya kesempatan peserta didik miskin dan peserta didik Disabilitas untuk mendapatkan layanan pendidikan	100	92,14	92,14
6	Meningkatkan Kualitas Pendidikan (SMP)	Meningkatnya Kualitas kelembagaan Satuan Pendidikan	100	64,47	64,47
		Meningkatnya Kualitas Siswa	100	70,90	70,90
		Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Daerah	100	78,37	78,37
7	Meningkatkan Kualitas Pendidikan (PTK)	Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100	56,74	56,74
8	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Daerah	Meningkatnya upaya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah	100	85,87	85,87
9	Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah	Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	BB	BB	100

C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN TAHUN SEBELUMNYA

Tabel. 3.3

Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Kinerja Tahun Sebelumnya.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Persentase Capaian 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Aksesbilitas Pendidikan (PAUD dan Dikmas)	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan berkualitas	95,23	98,43	98,43
		Meningkatnya kesempatan peserta didik miskin dan peserta didik Disabilitas untuk mendapatkan layanan pendidikan	92,36	91,87	91,87
		Meningkatnya Kualitas kelembagaan Satuan Pendidikan	98,90	98,43	98,43
2	Meningkatkan Kualitas Pendidikan (PAUD dan Dikmas)	Meningkatnya Kualitas kelembagaan Satuan Pendidikan	97,13	82,88	82,88
3	Meningkatkan Aksesbilitas Pendidikan (SD)	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan berkualitas	85,81	94,66	94,66
		Meningkatnya kesempatan peserta didik miskin dan peserta didik Disabilitas untuk mendapatkan layanan pendidikan	99,83	95,33	95,33
4	Meningkatkan Kualitas Pendidikan (SD)	Meningkatnya Kualitas kelembagaan Satuan Pendidikan	73,42	71,06	71,06
		Meningkatnya Kualitas Siswa	79,04	96,43	96,43
		Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Daerah	81,02	94,29	94,29
5	Meningkatkan Aksesbilitas Pendidikan (SMP)	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan berkualitas	89,45	93,59	93,59
		Meningkatnya kesempatan peserta didik miskin dan peserta didik Disabilitas untuk mendapatkan layanan	98,75	92,14	92,14

		pendidikan			
6	Meningkatkan Kualitas Pendidikan (SMP)	Meningkatnya Kualitas kelembagaan Satuan Pendidikan	66,30	64,47	64,47
		Meningkatnya Kualitas Siswa	88,49	70,90	70,90
		Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Daerah	74,78	78,37	78,37
7	Meningkatkan Kualitas Pendidikan (PTK)	Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	71,67	56,74	56,74
8	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Daerah	Meningkatnya upaya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah	85,54	85,87	85,87
9	Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah	Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	BB	BB	100

D. ANALISIS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL KINERJA YANG TELAH DICAPAI.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia.

1. Sumber Daya Biaya/Anggaran

Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = \left(\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right.$$

Pada tahun 2025 realisasi biaya untuk semua program dan kegiatan adalah **Rp. 509.771.297.702,97** sementara target biaya untuk semua program dan kegiatan yaitu **Rp. 595.083.934.923,00.** Dengan rumus efisiensi di atas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program dan kegiatan adalah 85,66%. Persentase efisiensi ini secara teori, target hampir tercapai maksimal dengan penggunaan sumber daya yang relatif hemat dan terkendali,

sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2025 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Namun bila dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi pengunaan sumber daya pada beberapa kegiatan.

Tabel 3.5
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Aksesbilitas Pendidikan (PAUD dan Dikmas)	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan berkualitas	100	98,43	91,87%
		Meningkatnya kesempatan peserta didik miskin dan peserta didik Disabilitas untuk mendapatkan layanan pendidikan	100	91,87	98,43%
		Meningkatnya Kualitas kelembagaan Satuan Pendidikan	100	98,43	82,88%
2	Meningkatkan Kualitas Pendidikan (PAUD dan Dikmas)	Meningkatnya Kualitas kelembagaan Satuan Pendidikan	100	82,88	94,66%
3	Meningkatkan Aksesbilitas Pendidikan (SD)	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan berkualitas	100	94,66	95,33%
		Meningkatnya kesempatan peserta didik miskin dan peserta didik Disabilitas untuk mendapatkan layanan pendidikan	100	95,33	71,06%
4	Meningkatkan Kualitas Pendidikan (SD)	Meningkatnya Kualitas kelembagaan Satuan Pendidikan	100	71,06	96,43%
		Meningkatnya Kualitas Siswa	100	96,43	94,29%
		Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Daerah	100	94,29	93,59%
5	Meningkatkan Aksesbilitas Pendidikan (SMP)	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan berkualitas	100	93,59	92,14%
		Meningkatnya kesempatan peserta didik miskin dan	100	92,14	64,47%

		peserta didik Disabilitas untuk mendapatkan layanan pendidikan			
6	Meningkatkan Kualitas Pendidikan (SMP)	Meningkatnya Kualitas kelembagaan Satuan Pendidikan	100	64,47	70,90%
		Meningkatnya Kualitas Siswa	100	70,90	78,37%
		Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Daerah	100	78,37	56,74%
7	Meningkatkan Kualitas Pendidikan (PTK)	Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100	56,74	85,87%
8	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Daerah	Meningkatnya upaya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah	100	85,87	100,00 %
9	Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah	Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	BB	BB	91,87%

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong sepanjang Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian memuaskan dengan efisiensi sebesar 86,20%. Hal ini terlihat dari pencapaian indikator rata-rata masih banyak dibawah 100%. Rendahnya rata-rata capaian disebabkan adanya kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan namun tidak bisa untuk direalisasikan.

Selain itu, dari sisi penggunaan anggaran juga menunjukkan kurangnya efisiensi karena anggaran yang digunakan dikembalikan ke kas daerah yang disebabkan oleh:

1. Adanya kegiatan lomba lomba baik di bidang SD maupun SMP yang tidak dapat terealisasi sepenuhnya dikerenakan pelaksanaan lomba dilakukan secara daring;
2. Pembatalan pembelian tanah dikarenakan tanah termasuk Kawasan hutan lindung;
3. Tidak terbayarkannya Belanja Jasa Pendidikan Insentif Guru Non ASN dikarenakan adanya Guru Non ASN yang Lulus PPPK

pada Tahun 2024 sebanyak 213 Orang. Dan masih mendapatkan Insentif sampai dengan bulan juni 2024 karena Guru Non ASN dilantik menjadi PPPK pada tanggal 27 Juni 2024 oleh karena itu bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tidak Melakukan Perubahan Anggaran Pada Belanja Jasa Tenaga Pendidikan

Pada Sub kegiatan tersebut sangat disayangkan tidak dilakukan pergeseran anggaran pada saat penyusunan anggaran perubahan. Hal ini lah yang menjadi bahan evaluasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kedepannya dalam penyusunan dan efisiensi anggaran.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong mengalami penurunan setiap tahunnya akibat banyaknya pegawai yang memasuki usia pensiun sementara dilain sisi penerimaan pegawai baru tidak ada. Namun demikian dengan jumlah personil yang ada tetap dioptimalkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

a. Komposisi Pegawai Dinas Menurut Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah Pegawai
1	Golongan IV	7	2	9
2	Golongan III	29	22	51
3	Golongan II	11	3	14
4	Golongan I	0	0	0
Total		47	27	74

b. Komposisi Pegawaian Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah Pegawai
1.	SD	0	0	0
2.	SMP	1	0	1
3.	SLTA	8	3	11
4.	Diploma	2	0	2
5.	Sarjana (S1)	27	22	49
6.	Megister (S2	8	3	11
7.	Doktor (S3)	0	0	0
	Total	46	28	74

E. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong memiliki anggaran sebesar Rp. **595.083.934.923,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan
Tahun Anggaran. 2025

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	
1	**Belanja Operasi**	**Rp.**	**509.241.269.173,00**
	Belanja Pegawai	Rp.	413.136.309.497,00
	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	85.360.543.429,00
	Belanja Hibah	Rp.	10.744.416.247,00
2	**Belanja Modal**	**Rp.**	**85.842.665.750,00**
	Belanja Modal Tanah	Rp.	5.289.455.000,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp.	17.201.935.067,00
	Belanja Modal Gedung & Bangunan	Rp.	59.305.845.975,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	0,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	3.195.429.708,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.	850.000.000,00
TOTAL		**Rp.**	**595.083.934.923,00**

Adapun rincian total APBDP, total anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, serta peresentase tahun 2025.

Rincian Total APBD dan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

Tahun	Perbandingan Anggaran APBD dan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong		
	Total APBDP (Rp)	Total Anggaran Dinas Pendidikan (Rp)	Persentase
2025	Rp 3.598.148.471.731,19	Rp. 595.083.934.923,00	16,54 %

Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 yang mendukung pencapaian target kinerja Tabalong, dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Bidang Sekretariat

Tabel 3.6
Alokasi dan Realisasi pada Sekretariat
Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Rp. 419.257.115.768,00**	**Rp. 350.426.005.772,00**	**83,58%**
1.01.01.2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 295.821.660,00	Rp. 251.411.381,00	84,99%
1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 13.420.000,00	Rp. 2.824.200,00	21,04%
1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 49.306.420,00	Rp. 31.323.450,00	63,53%
1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 233.095.240,00	Rp. 217.263.731,00	93,21%
1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 411.581.422.179,00	Rp. 343.815.166.213,00	83,54%
1.2.02.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 411.581.422.179,00	Rp. 343.815.166.213,00	83,54%
1.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 71.846.940,00	Rp. 52.385.500,00	72,91%
1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 71.846.940,00	Rp. 52.385.500,00	72,91%

1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 386.415.000,00	Rp. 236.495.800,00	61,20%
1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp. 272.059.000,00	Rp. 131.015.800,00	48,16%
1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 114.356.000,00	Rp. 105.480.000,00	92,24%
1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.414.714.431,00	Rp. 1.324.622.184,00	93,63%
1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 789.761.758,00	Rp. 713.999.990,00	90,41%
1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 31.119.673,00	Rp. 19.731.300,00	63,40%
1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 593.833.000,00	Rp. 590.890.894,00	99,50%
1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta Daerah	Rp. 1.202.632.704,00	Rp. 1.164.296.399,00	96,81%
1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 1.202.632.704,00	Rp. 1.164.296.399,00	96,81%
1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.181.500.910,00	Rp. 1.677.069.595,00	76,88%
1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 236.240.000,00	Rp. 182.460.989,00	77,24%
1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.945.260.910,00	Rp. 1.494.608.606,00	76,83%

1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.122.761.944,00	Rp. 1.904.558.700,00	89,72%
1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 73.370.000,00	Rp. 73.056.900,00	99,57%
1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 105.020.000,00	Rp. 78.174.800,00	74,44%
1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 48.760.000,00	Rp. 36.417.000,00	74,69%
1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 1.895.611.944,00	Rp. 1.716.910.000,00	90,57%

Program dan kegiatan di sekretariat di dukung dengan dana sebesar **Rp. 419.257.115.768,00** dengan realisasi keuangan pada tahun 2025 sebesar **Rp. 350.426.005.772,00** atau **83,58%.** Dana ini digunakan untuk tercapainya tujuan peningkatan layanan dan akuntabilitas kinerja yang bermutu yang didukung oleh indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator nilai hasil evaluasi AKIP pada sekretariat.

2. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat :

Tabel 3.7
Alokasi dan Realisasi pada Bidang Pembinaan PAUD Dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian (%)
2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Rp. 159.828.571.480,00**	**Rp. 147.862.877.357,97**	**92,51%**
2.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Rp. 30.380.206.125,00**	**Rp. 28.828.203.480,00**	**94,89%**
1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp. 2.703.780.000,00	Rp. 2.653.855.838,00	98,15%
1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD	Rp. 269.690.980,00	Rp. 264.019.050,00	97,90%
1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Rp. 10.114.680.000,00	Rp. 9.616.910.000,00	95,08%
1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Rp. 259.399.008,00	Rp. 232.621.300,00	89,68%
1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rp. 245.589.969,00	Rp. 225.778.000,00	91,93%
1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp. 5.758.992.000,00	Rp. 4.971.475.878,00	86,33%
1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp. 4.907.138.765,00	Rp. 4.796.729.000,00	97,75%
1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Rp. 4.255.935.110,00	Rp. 4.227.870.414,00	99,34%

1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp. 1.865.000.293,00	Rp. 1.838.944.000,00	98,60%
2.2.04 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	**Rp. 3.535.898.537,00**	**Rp. 2.930.612.977,00**	**82,88%**
1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Rp. 241.500.000,00	Rp. 118.801.000,00	49,19%
1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp. 2.299.320.000,00	Rp. 1.908.507.677,00	83,00%
1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp. 995.078.537,00	Rp. 903.304.300,00	90,78%

Program dan kegiatan pada bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal didukung dengan pagu dana sebesar **Rp. 33.916.104.662,00** dengan realisasi keuangan pada tahun 2025 sebesar **Rp. 31.758.816.457,00** atau **93,64%**. Program dan kegiatan pada bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal mendukung indikator kinerja sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD;
2. Persentase Penduduk yang Berusia > 15 Tahun Melek (Tidak Buta Aksara).

3. Bidang Pembinaan Pendidikan SD

Tabel 3.8
Alokasi dan Realisasi pada Bidang Pembinaan Pendidikan SD
Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian (%)
2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Rp. 159.828.571.480,00**	**Rp. 147.862.877.357,97**	**92,51%**
2.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp. 72.826.139.147,00	Rp. 68.118.504.880,00	93,54%
1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp. 402.847.800,00	Rp. 390.297.500,00	96,88%
1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp. 1.018.004.000,00	Rp. 995.909.490,00	97,83%
1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp. 9.844.770.832,00	Rp. 9.787.768.415,00	99,42%
1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rp. 948.554.000,00	Rp. 946.194.450,00	99,75%
1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Rp. 1.360.455.600,00	Rp. 1.327.200.289,00	97,56%
1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp. 1.089.297.679,00	Rp. 832.501.034,00	76,43%
1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp. 250.800.000,00	Rp. 123.500.000,00	49,24%
1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp. 566.514.358,00	Rp. 425.251.700,00	75,06%

1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp. 1.651.764.067,00	Rp. 1.170.265.769,00	70,85%
1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp. 25.282.201.000,00	Rp. 24.117.132.593,00	95,39%
1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp. 202.866.468,00	Rp. 77.012.000,00	37,96%
1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp. 112.941.320,00	Rp. 54.955.000,00	48,66%
1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp. 58.705.400,00	Rp. 55.570.382,00	94,66%
1.01.02.2.01.0038 Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp. 6.960.000,00	Rp. 6.960.000,00	100,00%
1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp. 111.843.400,00	Rp. 42.835.000,00	38,30%
1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 127.800.000,00	Rp. 127.800.000,00	100,00%
1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi	Rp. 51.946.400,00	Rp. 25.320.000,00	48,74%
1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Rp. 192.500.000,00	Rp. 181.500.429,00	94,29%
1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp. 577.350.000,00	Rp. 574.197.728,00	99,45%
1.01.02.2.01.0047	Rp. 6.937.357.800,00	Rp. 5.558.151.753,00	80,12%

Pembangunan Ruang Kelas Baru			
1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp. 2.831.246.363,00	Rp. 2.784.658.619,00	98,35%
1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Rp. 297.348.860,00	Rp. 276.166.870,00	92,88%
1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp. 6.641.008.800,00	Rp. 6.564.437.050,00	98,85%
1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rp. 7.144.500.000,00	Rp. 7.104.250.000,00	99,44%
1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp. 5.116.555.000,00	Rp. 4.568.668.809,00	89,29%

Program dan kegiatan pada bidang pembinaan pendidikan SD didukung dengan pagu dana sebesar **Rp. 72.826.139.147,00** dengan realisasi keuangan pada tahun 2025 sebesar **Rp. 68.118.504.880,00** atau **93,54%.** Program dan kegiatan pada bidang pembinaan pendidikan SD mendukung indikator kinerja sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD;
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD;
3. Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A;
4. Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI.

4. Bidang Pembinaan Pendidikan SMP

Tabel 3.9
Alokasi dan Realisasi pada Bidang Pembinaan Pendidikan SMP
Tahun 2024

Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian (%)
2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Rp. 159.828.571.480,00**	**Rp. 147.862.877.357,97**	**92,51%**
2.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp. 53.086.327.671,00	Rp. 47.985.556.020,97	90,39%
1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp. 1.153.952.000,00	Rp. 1.145.495.000,00	99,27%
1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp. 1.018.000.000,00	Rp. 986.068.000,00	96,86%
1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium	Rp. 2.259.145.000,00	Rp. 2.205.318.577,65	97,62%
1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp. 5.355.543.526,00	Rp. 5.278.712.001,28	98,57%
1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp. 3.254.210.858,00	Rp. 3.050.774.000,00	93,75%
1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp. 5.271.798.080,00	Rp. 5.054.951.550,00	95,89%
1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rp. 8.449.060.285,00	Rp. 7.854.649.026,00	92,96%
1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp. 1.932.070.587,00	Rp. 1.429.944.683,00	74,01%
1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp. 705.800.000,00	Rp. 212.000.000,00	30,04%

1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp. 650.244.364,00	Rp. 428.645.160,00	65,92%
1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp. 1.440.788.014,00	Rp. 1.188.866.399,00	82,52%
1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rp. 9.111.650.000,00	Rp. 8.420.964.280,00	92,42%
1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp. 500.000,00	Rp. 0	0,00%
1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 241.535.569,00	Rp. 129.549.750,00	53,64%
1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp. 199.779.178,00	Rp. 81.470.500,00	40,78%
1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp. 6.390.557.160,00	Rp. 5.477.310.873,04	85,71%
1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp. 414.193.050,00	Rp. 309.050.903,00	74,62%
1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp. 5.237.500.000,00	Rp. 4.731.785.318,00	90,34%

Program dan kegiatan pada bidang pembinaan pendidikan SMP didukung dengan pagu dana sebesar **Rp. 53.086.327.671,00** terealisasi keuangan pada tahun 2024 sebesar **Rp. 47.985.556.020,97** atau **90,39%** Program kegiatan pada bidang pembinaan pendidikan SMP ini mendukung indikator kinerja sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP;
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP;
3. Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTs/ Paket B;
4. Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs.

5. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

Tabel 3.10
Alokasi dan Realisasi pada Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian (%)
4 PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	**Rp. 7.744.353.203,00**	**Rp. 4.394.465.516,00**	**56,74%**
4.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Rp. 7.744.353.203,00	Rp. 4.394.465.516,00	56,74%
1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp. 2.208.174.553,00	Rp. 1.489.223.516,00	67,44%
1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp. 5.536.178.650,00	Rp. 2.905.242.000,00	52,48%

Program dan kegiatan pada Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan didukung dengan pagu dana sebesar **Rp. 7.744.353.203,00** terealisasi keuangan pada tahun 2025 sebesar **Rp. 4.394.465.516,00** atau **56,74%.** Program kegiatan pada Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut :

1. Persentasi PTK PAUD Formal yang memiliki kualifikasi S1/D.IV;
2. Persentasi PTK SD Formal yang memiliki kualifikasi S1/D.IV;
3. Persentasi PTK SMP Formal yang memiliki kualifikasi S1/D.IV.

6. Bidang Kebudayaan

Tabel 3.11
Alokasi dan Realisasi pada Bidang Kebudayaan
Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian (%)
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Rp. 7.644.311.070,00**	**Rp. 6.745.410.491,00**	**88,24%**
2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.930.378.684,00	Rp. 2.625.608.136,00	89,60%
2.22.02.2.01.0001 Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp. 2.930.378.684,00	Rp. 2.625.608.136,00	89,60%
2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.562.932.386,00	Rp. 1.309.553.355,00	83,79%
2.22.02.2.02.0001 Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Rp. 1.562.932.386,00	Rp. 1.309.553.355,00	83,79%
2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.151.000.000,00	Rp. 2.810.249.000,00	89,19%
2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Rp. 3.151.000.000,00	Rp. 2.810.249.000,00	89,19%
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**Rp. 609.583.402,00**	**Rp. 342.538.566,00**	**56,19%**
2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Rp. 609.583.402,00	Rp. 342.538.566,00	56,19%
2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya	Rp. 609.583.402,00	Rp. 342.538.566,00	56,19%

Program dan kegiatan pada Bidang Kebudayaan didukung dengan pagu dana sebesar **Rp 8.253.894.472,00** realisasi keuangan pada tahun 2024 sebesar **Rp 7.087.949.057,00** atau **85,87%**. Program dan kegiatan pada bidang kebudayaan mendukung indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase Kebudayaan Daerah yang dilestarikan;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan LKPJ dan LPPD Perangkat daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 disusun sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) Undang- undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah. Laporan penyelenggaraan LKPJ dan LPPD perangkat daerah Kabupaten Tabalong ini berdasarkan program dan kegiatan yang ada pada RKA / DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 yang terdiri dari 5 Program,14 kegiatan, dan 66 sub kegiatan.

Perkembangan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 dapat dilihat dari perbandingan pagu dan realisasi secara keseluruhan, dimana pada anggaran tahun 2025 DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pagu belanja sebesar **Rp. 595.083.934.923,00** sedangkan realisasi sebesar **Rp. 509.771.297.702,97** atau **85,66%**.

Dari 16 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029 16 Indikator kegiatan yang memenuhi target yang ditetapkan. Keberhasilan yang dicapai dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2025 tersebut patut disyukuri, mengingat pencapaiannya diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong. Namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong tidak cepat berpuas diri karena masih banyak hal yang perlu dievaluasi kembali terkait perencanaan program dan kegiatan maupun perencanaan anggaran.

Hasil-hasil yang telah dicapai selama ini mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan mitra pendukungnya yang bisa dijadikan pondasi yang kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal dimasa yang akan datang. Di samping

berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu saja masih banyak terdapat celah kekurangan yang perlu diperbaiki. Demikian penyampaian Laporan LKPJ dan LPPD perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Pendidikan di Kabupaten Tabalong. Semoga Allah SWT memberkati kita semua. Aamiin.

Tanjung, 26 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tabalong,

H. HASBI, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat. I
NIP 196802141988041002